

**KEJAHATAN INTELEKTUAL
DALAM PERSPEKTIF KEMERDEKAAN**

Oleh: Rosma Kadir

Abstarct

The fundamental nature from independence is freedom by esteeming others independence. Freedom, not as of our eye are free independenced from all kind of colonialisation and discrimination, but value from an independence would far more means if we to let others also can enjoy his own freedom, do not disturb it, more than anything else by seize its the rights.

Independence at conceptual level, analogy as a situation, where we feel independent, feel secure, and free does all something according to our desires, free articulated as free holding responsible, so that thereby will not bother independence of others with our freedom.

Kata Kunci: *Kejahatan Intelektual, kebebasan, kemerdekaan*

Pendahuluan

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang heterogen dan majemuk, yang sangat menjunjung tinggi *pluralisme*, *diferensiasi*, serta menempatkan *disparitas* sebagai bagian dari budaya, adalah konsep yang terterima dan menjadi anatena pada masyarakat kita. Pernyataan ini sedikit ada benarnya, fakta sejarah membuktikan, dari sisi historisnya, alam kemerdekaan yang tengah kita hirup dan nikmati hari ini, adalah buah manis dari hasil keberagaman.

Tentulah masih jelas dalam ingatan kita, spektrum perjuangan

meraih sebuah kemerdekaan, adalah *holistisitas* para pahlawan, bisa kita sebut seperti itu, yang berasal dari setiap sudut dan pelosok di Negara Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dengan tidak memperdulikan segala tetek bengek identitas inheren. Satu tekad mereka, meraih sebuah kemerdekaan.

Satu lagi realitas sejarah, bahwa kemerdekaan Negara Indonesia adalah hasil jerih payah dan kolaborasi dari seluruh masyarakat Indonesia, yang berasal dari berbagai latar belakang, suku, agama, ras, dan

juga budaya. Yang dengan mengesampingkan segala *background* primordial tersebut, berusaha menyatukan jiwa dan juga raga demi mencapai kemerdekaan yang telah begitu lama di damba.

Berbicara mengenai kemerdekaan, kita diperhadapkan dengan berbagai pertanyaan, apakah kita telah benar-benar merdeka? Seperti apakah kemerdekaan itu? Apa indikator dari kemerdekaan? Apakah kita betul merasa telah merdeka, sementara ada sebagian dari masyarakat kita yang merasa tidak benar-benar merdeka, ketika hak-haknya sebagai individu di rampas, di intimidasi, di *diskriminasi* serta di *zalimi*. Bahkan untuk mempertahankan sesuatu yang benar-benar miliknya dia harus berjibaku dengan sistem.

Melihat realitas jamak ini, sepertinya kita perlu menepung kembali terminologi dan hermeneutika sebuah kemerdekaan, arti dan juga nilai-nilai yang terkandung didalamnya, sehingga tidak terjadi misinterpretasi terhadap kemerdekaan, lebih dari itu kita dapat menempatkan kemerdekaan pada proporsi dan koridor yang tepat.

Kemerdekaan pada tataran konseptual, dianalogikan sebagai suatu keadaan, dimana kita merasa independen, *feel secure*, dan bebas melakukan segala sesuatu sesuai

keinginan kita, walaupun bebas di sini diartikulasikan sebagai bebas yang bertanggung jawab, sehingga dengan demikian kita tidak akan pula mengganggu kemerdekaan orang lain dengan kebebasan kita.

Akan tetapi bukan permasalahan itu yang akan kita bahas dan diskusikan, yang menjadi *main point* di sini, adalah kemerdekaan dalam artian yang sebenarnya (*The Real Freedom*), kemerdekaan yang hakiki, yang akan menempatkan kita sebagai manusia pada fitrahnya, dimana ketika kita ditakdirkan sebagai makhluk ciptaan tuhan, maka dengan sendirinya ada banyak hal yang ikut melekat pada fitrah kita, salah satunya adalah kemerdekaan.

Di dalam konteks kemerdekaan secara parsial, ada hal yang patut di telaah lebih dalam lagi, khususnya di dalam kultur masyarakat kita. Indonesia yang di kenal dahulunya, sebagai Negara yang berlatar belakang budaya yang begitu kental dengan nuansa *religius*, saling menghargai, juga memiliki rasa simpati dan empati sesamanya, adalah mungkin epilog lama yang telah usang dan berkarat.

Streotype basi itu tidak pernah terdengar lagi di zaman penetrasi dan dominasi kapitalisme yang semakin membumi, roh kapitalisme telah ikut menginjeksi moral, mental, dan *mindset* masyarakat Indonesia,

sehingga mendobrak segala antitesa tentang kultur yang selama ini menjadi *image* bangsa kita di mata dunia.

Apakah krisis multidimensi yang mendera bangsa ini, telah pula ikut mengepidemi pada hal-hal yang bersifat mikro, seperti kultur? Kita sejenak bisa berhipotesa dan menginterpretasikan bahwa ada sebuah hal baru yang menggejala pada bangsa kita, yang bisa kita katakan sebagai krisis kultural. Cukup aneh memang, harusnya kultur bisa digunakan sebagai media yang bisa mereduksi berbagai persoalan kompleks krisis yang berkepanjangan ini, bukan malah menciptakan satu model krisis baru. Ketika kultur saja yang notabeneanya adalah ideologi bangsa kita, telah ikut terkikis oleh sebuah peradaban, bagaimana nantinya dengan problematika lainnya yang jauh lebih kompleks dari itu, yang bukan merupakan bagian dari ideologi kita? Jawabannya adalah sangat jelas bahwa akan lebih parah, tentunya jika tidak ingin dikatakan mati dan terkubur.

Belakangan ini sudah sangat jarang terdengar lagi, cerita indah tentang gotong royong, saling membantu, dan juga keperdulian sosial, walaupun ada yang berniat membantu itu sekedar *lip service* semata, bahkan yang lebih fatal lagi

bantuan yang diberikan dijadikan sebagai alat kepentingan, dengan kedok keperdulian sosial.

Sudah lunturkah kultur sosial, yang sebelumnya begitu mengakar pada kepribadian masyarakat Indonesia? ataukah ini sebuah transformasi kultur?, yang tererosi oleh gempuran kapitalis-imperialis yang sejak awal memang menginginkan pesaingnya untuk benar-benar mati, dengan demikian memuluskan jalannya untuk masuk. Atau mungkin inilah wajah baru kultur Indonesia hari ini, sesuatu yang mungkin tak akan pernah terbayangkan oleh para pendahulu kita. Sebuah *evolusi* besar pada kultur kita, seakan menjadi pelengkap cerita sedih tentang Indonesia, di antara begitu banyak cerita-cerita sedih lainnya, yang berawal dari tonggak peradaban reformasi ditancapkan, tidak ada yang salah dengan reformasi, yang salah mungkin pengejawantahan akan arti reformasi itu sendiri.

Hari ini kejahatan dan kriminalitas sepertinya bermetamorfosa dengan tampilan yang jauh lebih santun, kejahatan tidak lagi pada bentuk *radikalitas* dan ekstrim semata, tetapi juga ada pada dimensi yang cukup intelek (*Soft Crime*), walaupun tidak meninggalkan jenis kejahatan refresif yang terus mewarnai perjalanan hidup bangsa Indonesia. Kejahatan kera putih

(*White Collar Crime*), manipulasi, *plagiarisme* adalah sebagian jenis yang bisa diidentifikasi sebagai kejahatan intelek, kejahatan ini terus berkembang dan telah menemukan jati dirinya di Indonesia, bahwa Indonesia merupakan ekosistem terbaik di dunia, sebagai tempat pengembang biakan kejahatan ini.

Indikatornya adalah bahwa dalam kurun sembilan tahun era reformasi, tidak ada signifikansi di dalam proses mereduksi berbagai persoalan kejahatan yang kita hadapi, justru dalam masa ini kejahatan seakan lebih eksis, melebihi masa sebelum reformasi, sekali lagi tidak ada yang menyalahkan reformasi, sistem yang ada dalam proses rekonstruksi bangsa inilah, yang belum cukup mempuni untuk dianggap sebagai sebuah alat reformasi yang ideal.

Korupsi hari ini telah menjadi sebuah *life style* masyarakat kita, padahal kita tidak sadar atau mungkin juga sadar tetapi tidak mau peduli, bahwa kita sedang menginkubasikan jenis penyakit moral ini, yang sedikit demi sedikit akan menggerogoti bangsa, sampai suatu saat penyakit ini akan benar-benar membunuh kita secara perlahan, hingga suatu saat menghantarkan bangsa ini pada kehancuran sistem secara fundamental. Korupsi merupakan hal yang lumrah bahkan menjadi trend pada

masyarakat kita, sistem birokrasi kita memberikan celah yang begitu besar kepada partisipan untuk memanfaatkan dan mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Korupsi seperti air bah, yang menghantam segala sesuatu di sekitarnya, korupsi mewabah dari *bottom up* hingga *top down*, dari pedesaan sampai perkotaan, dan bahkan ada kecenderungan korupsi dilakukan secara berjamaah, *euforia* ini seperti elegi merdu yang melenakkan bangsa kita.

Setali tiga uang dengan persoalan korupsi, masalah *plagiarisme* dan manipulasi pun semakin marak bahkan terus eksis, masalah pembajakan bukan merupakan hal yang baru lagi bagi kita, orang dapat dengan mudahnya membajak hasil karya orang lain, dengan tanpa merasa bersalah. Adalah sebuah kewajaran apabila tidak merasa bersalah, karena sistem regulasi dan supremasi hukum kita terlalu lunak, bahkan cenderung fleksibel, tergantung kepentingan siapa yang dihadapi.

Pundemikian dengan problematika manipulasi, dengan lembaran rupiah misalnya, kita dengan mudahnya, dapat membeli gelar doktor, gelar yang seharusnya dipertanggung jawabkan dihadapan masyarakat, akan tetapi karena terstimulus oleh dominasi keinginan *hedonis*, kita dengan entengnya dapat menepikan masalah moral.

Masalah-masalah yang di elaborasi diatas, adalah bagian kecil dari begitu kompleksnya persoalan kejahatan intelektual yang melingkupi bangsa ini, tetapi terkadang sistem kita tidak mengkategorikan hal tersebut sebagai bagian dari tindakan kriminalitas.

Sistem lebih cenderung memvonis maling ayam sebagai seorang penjahat, yang harus digebuki, dibandingkan dengan menyeret koruptor ke pengadilan, padahal jelas-jelas seorang koruptor merugikan Negara miliaran rupiah, dibandingkan maling ayam yang seharga lima puluh ribuan.

Hal yang juga patut dicermati bahwa kejahatan intelektual *ber-excess* negatif pada masyarakat secara umum, karena kejahatan ini secara sistematis merusak tatanan subsistem di dalam masyarakat, kita akan dengan sengaja merampas kemerdekaan orang lain, kemerdekaan untuk hidup tenteram dengan perekonomian yang cukup, tanpa perlu berpikir lagi, besok akan makan apa.

Landasan Teori

Homans (1967: 60), mengatakan: "Norma sosial dan norma kelompok yang pasti memaksakan kecocokan perilaku terhadap banyak orang. Persoalannya bukanlah memaksa; individu harus menyesuaikan diri, jika mereka berbuat demikian,

karena mereka mendapatkan keuntungan dengan menyesuaikan diri itu yang menjelaskan pengaruh perilaku yang dianggap menguntungkan".

Jamil Salmi (2003: 38), mengatakan bahwa "Kekerasan *alienatif* merujuk pada pencabutan hak-hak individu yang lebih tinggi, misalnya hak perkembangan emosional, budaya, atau intelektual". Secara pragmatis apa yang di urai di atas akan menghantarkan kita pada pemahaman kompleks sebuah kekerasan, yang merupakan redefinisi lanjut tentang kejahatan, kejahatan dianalogikan secara sederhana, dan bukan menyederhanakan kejahatan. Untuk lebih jelasnya, kita mengerucutkan pembahasan ini pada beberapa bagian sebagai berikut:

Kemerdekaan Hakiki

Dimensi mengenai kejahatan intelektual dapat merampas kemerdekaan orang lain seperti yang di bahas pada ulasan awal penulisan ini, adalah pernyataan yang ada benarnya. Bahwa penyakit moral seperti korupsi yang telah cukup kronis melanda Negara kita, mengakibatkan penderitaan pada sebagian besar masyarakat, dan juga *excess* buruknya akan berpeluang merusak semua sendi sistem yang ada di negara kita, contohnya saja krisis multidimensi yang berkepanjangan ini, salah satu

indikatornya adalah disebabkan oleh masalah korupsi.

Lebih parah lagi, implikasi buruk ini sangatlah merugikan rakyat kecil, mengapa rakyat kecil? Karena kurang lebih 40 % masyarakat kita adalah kaum yang termarginalkan, logikanya dari 220 juta penduduk Indonesia (53,24 %), sekitar 88 juta (24, 2 %) penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. Sebuah populasi yang tentunya besar pada sebuah Negara yang katanya *gemah ripah loh djinawi*.

Rakyat kecil adalah sistem yang paling dirugikan ketika korupsi terus berlangsung, karena seharusnya Negara sebagai sistem terbesar di dalam tatanan berkehidupan dan berkebangsaan memiliki tanggung jawab absolut untuk mensejahterahkan rakyatnya, akan tetapi lilitan korupsi yang begitu kuat, membuat Negara hanya ikut-ikutan prihatin, padahal yang dibutuhkan masyarakat kita bukan bentuk simpati semu, tetapi sebuah *way out* yang dapat menyelamatkan mereka dari nestapa akut yang berkepanjangan.

Deduktifitasnya, korupsi memiliki andil yang cukup besar dalam merampas kemerdekaan orang lain, kemerdekaan dari rasa adil, kemerdekaan untuk hidup berkecukupan, dan juga kemerdekaan untuk menikmati hasil kekayaan alam, bangsa ini. Masalah

plagiarisme dan manipulasi, juga cukup mengemuka belakangan ini, bahkan Negara Indonesia disamping cukup populis dengan korupsinya, juga dianggap sebagai Negara pembajak terbesar di dunia, sebuah apresiasi yang cukup ironis terhadap Negara kita. Dimana-mana kita dapat menjumpai hasil karya orang lain dibajak, dilegitimasi dan dipublikasikan sebagai hasil karya sendiri, dan juga keuntungannya dikeruk sendiri. Padahal secara tidak sadar, bahwa perbuatan tersebut telah mengangangi hak-hak orang lain, kemerdekaan orang lain, orang yang seharusnya berhak mendapatkan hak-haknya akhirnya tersubordinasi karena tindakan kriminalitas ini.

Hal yang patut juga diseriusi yang koheren dengan kejahatan intelektual ini adalah masalah manipulasi, manipulasi sudah ada sejak dahulu di dalam kultur masyarakat Indonesia, bahkan mungkin telah menjadi tradisi. Di mana orang bebas meniru dan memalsukan apa saja sesuai keinginan dan kebutuhannya, orang berhak memanipulasi segala sesuatunya untuk mencapai tujuannya. Tanpa perlu memperdulikan hak-hak orang lain, yang terpenting tujuannya tercapai, bagaimanapun medianya.

Suatu pernyataan yang cukup kontraproduktif, bagaimana mungkin kita dapat meraih apa yang

kita inginkan dengan tanpa sebuah usaha yang *tough* dan halal. Sekali lagi demi alasan kepentingan, konsep seperti ini dapat diterima di dalam sistem kita. Kemerdekaan memang masih terasa jauh dari harapan, walaupun kita hidup sebagai bangsa yang merdeka, akan tetapi sesungguhnya kita belum benar-benar merdeka dalam artian yang sebenarnya, masih banyak masyarakat bangsa ini yang terus terpasung dalam belenggu dan tirani sistem, dan juga masih terlalu banyak di antara kita yang hak-haknya di kebiri oleh konsep egaliteranisme semu.

Regulasi Prematur

Tidak bisa dipungkiri bahwa meningkatnya jumlah kejahatan yang diidentifikasi sebagai kejahatan intelektual adalah bersumber dari lemahnya produk hukum kita, sistem perundang-undangan hukum yang ada di Negara kita masih terlalu rapuh sehingga memungkinkan disusupi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Lebih parah dari itu, sistem hukum yang rapuh tersebut, di *guide* oleh satu kekuatan baru sehingga menjadi kuat dengan preskripsi, kekuatan baru tersebut bisa berintegrasi dengan sistem hukum kita, dan ikut bersama dalam membuat segala *policy* bahkan regulasi. Sepertinya asas balas budi ini menjadi hal yang tidak terlalu

mengagetkan lagi, apakah begitu mudahnya kita bisa menyetir dan mengatur sistem hukum kita? Realitas memang membuktikan seperti itu, bahwa seseorang yang memiliki power bisa mengatur bahkan mengendalikan apapun, termasuk produk hukum. Walaupun tidak dapat mengintervensi sistem hukum, setidaknya dapat berkompromi dengan sistem hukum tersebut.

Adalah sangat wajar jika ada yang berpendapat seperti itu, sistem hukum di Negara kita itu liquid seperti air, dia akan mengikuti bentuk wadah, tergantung bagaimana wadah tersebut bisa membentuknya. Sehingga memungkinkan banyak sekali pembenaran-pembenaran konsensus yang akan berpihak pada kepentingan, pun demikian masih harus melalui tahapan seleksi, mana yang akan dijadikan kepentingan prioritas dan mana yang bukan, jadi gamblangnya kepentingan adalah penentu takdir hukum kita.

Disamping itu sistem regulasi kita belum cukup mengakomodir semua aspek yuridis di dalam Negara ini, produk yang merupakan warisan kolonial Belanda ini terlalu uzur dan tidak *up to date* dalam menjawab peradaban, banyak sekali kasus yang zaman dahulunya tidak terdeteksi sebagai sebuah tindakan kriminal, sekarang malah hadir dalam berbagai bentuk.

Mungkin zaman dahulu peradaban bangsa ini masih terlalu suci dan belum terkooptasi oleh pengaruh buruk imperialisme, sehingga rasanya tidak perlu membuat perangkat hukum yang berlebihan.

Aturan perundang-undangan hukum di Negara Indonesia banyak sekali menimbulkan dikotomi interpretasi, sehingga mengakibatkan pelaku kejahatan dapat dengan mudahnya berkelit dengan alasan berkiblat pada hukum itu sendiri juga, karena aturan-aturan yang ada hari ini tidak cukup rigid dan mengikat sistem didalamnya menjadi sebuah aglomerasi absolut, yang nantinya akan menempatkan produk tersebut pada rel yang benar.

Perangkat hukum yang lemah dan cenderung tidak bisa berkutik ini, menyebabkan partisipan kriminalitas memiliki celah untuk mengakali aturan hukum dan membuat pembenaran tersendiri, orang akan dengan mudahnya melakukan suatu tindakan kriminal tanpa perlu memperdulikan benar dan salah, dan juga dapat merugikan orang lain atau tidak

Penegakan hukum di Negara ini seperti simalakama, di makan ayah mati, tidak di makan ibu mati, entah kepentingan siapa yang harus diprioritaskan.

Menegakkan supremasi hukum berarti akan berhadapan dengan sistem, sementara di sisi lain apabila tidak

ditegakkan akan sangat merugikan kepentingan orang lain, lebih dari itu akan menciderai produk hukum itu sendiri. Sebenarnya apabila kita fair dan ingin mengembalikan integritas produk hukum pada jalur yang benar, kita harus menempatkan segala sesuatunya pada proporsi yang sebenarnya, kita tidak perlu memperdulikan kepentingan siapa yang harus didahulukan, yang terpenting adalah melihat dimensi dari perspektif permasalahan, walaupun nantinya kita akan berhadapan dengan sistem.

Restrukturisasi sistem hukum adalah sebuah kata kunci dalam mengatasi persoalan ini, kita harus meredefinisi lagi arti dari kata hukum, dan menempatkannya sebagai institusi kelembagaan, bukan orang per orang, selanjutnya menata kembali sistem hukum itu menjadi jauh lebih absah serta kredibel, dan rasanya kita belum terlambat untuk itu.

Simpulan

Hakekat dari kemerdekaan, adalah merdeka dengan menghargai kemerdekaan orang lain. Merdeka, bukan semata kita bebas merdeka dari segala bentuk kolonisasi dan diskriminasi, tetapi nilai dari sebuah kemerdekaan akan jauh lebih berarti apabila kita membiarkan orang lain juga dapat menikmati kemerdekaannya sendiri, bukan mengusiknya,

apalagi dengan merampas hak-haknya.

Kejahatan intelektual yang menjamur sekarang ini, adalah implikasi buruk sistem hukum kita yang masih terlalu prematur, sistem hukum yang masih berpihak kepada pengusaha dan penguasa yang berbanding lurus dengan kepentingan.

Celah menganga dalam produk hukum kita menimbulkan berbagai interpretasi jamak pada masyarakat, orang senantiasa dapat mengaburkan arti kriminalitas dengan pembenaran sendiri, karena alasan produk hukum itu sendiri. Dan

mungkin sedikit ada benarnya, karena terlalu lunak dan fleksibelnya perangkat hukum kita sehingga memudahkan orang untuk mengintervensinya, atau mungkin bisa saja peluang ini sengaja di buka untuk membiarkan masuknya berbagai kepentingan.

Kita tentunya tidak perlu terjebak pada euforia saling menyalahkan, dan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Akan tetapi urgensi yang harus kita lakukan saat ini adalah segera menata kembali sistem dan perangkat hukum kita dalam format restrukturisasi total.

Daftar Pustaka

- Anwar, Dewi Fortuna dkk. 2005. *Konflik Kekerasan Internal*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- Ginsberg, Morris, 2003. *Keadilan d alam Masyarakat*. Pondok Edukasi. Jakarta
- Harskamp, Anton Van. 2005. *Konflik-konflik Dalam Ilmu Sosial*. Kanisius. Yogyakarta
- Nugroho, Fera M.A dkk. 2004. *Konflik dan Kekerasan pada aras Lokal*. Pustaka Percik. Turusan Salatiga Oktober
- Ritzer George – Douglas J. Goodman. 2003. *Teori Sosiologi Modern*. Prenada Media. Jakarta.
- Salmi, Jamil. 2003. *Kekerasan dan Kapitalisme*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Indonesia
- Salim, Agus, 2002. *Perubahan Sosial sketsa teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia*, PT. Tiara Wacana. Yogyakarta